

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Telaah Pustaka

##### 1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

*Agency theory* menjelaskan hubungan antara pemilik (*principle*) dan manajemen (*agent*), dimana pemilik (*principle*) memberikan hak pengambilan keputusan kepada manajemen (*agent*) dalam bisnis perusahaan, kemudian pemilik (*manager*) memeriksa apakah tindakan manajemen untuk kepentingan pemilik atau justru merugikan pemiliknya (Ariana 2016). Dalam sebuah artikel (Ariana 2016), Eisenhardt (1989) berpendapat bahwa teori keagenan muncul karena ada individu-individu yang berusaha bertindak untuk keuntungan pribadi dan mengabaikan kepentingan perusahaan.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa agen memiliki lebih banyak informasi tentang perusahaan daripada prinsipal. Asumsi ini disebabkan prinsipal tidak dapat mengendalikan perusahaan sepanjang waktu. Asimetri informasi terjadi ketika prinsipal tidak dapat memastikan apa yang dilakukan agen selama menjalankan perusahaan. Perdebatan ini kemudian dapat menyebabkan biaya agensi. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam (Ariana 2016) biaya keagenan terdiri dari :

- a. Biaya pengawasan (*Monitoring Expenditure*), adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik sebagai bentuk pengawasan yang digunakan untuk mengontrol tindakan agen agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan pemilik.

- b. Biaya verifikasi (*Bonding expenditure*), adalah biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk memastikan bahwa agen mematuhi peraturan dan tidak melakukan tindakan apapun yang dapat merugikan pemilik.
- c. Kerugian sisa (*Residual loss*), merupakan salah satu bentuk kerugian yang diakibatkan oleh berkurangnya kesejahteraan pemilik akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan agen.

Perusahaan dengan biaya keagenan yang rendah menunjukkan bahwa tindakan agen adalah untuk kepentingan pemilik, bukan hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan agen sebagai bentuk tanggung jawab dalam memenuhi keinginan pemilik adalah dengan mengungkapkan informasi perusahaan, termasuk informasi tanggung jawab sosial, seluas-luasnya.

## 2. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori pemangku kepentingan merupakan teori yang banyak digunakan saat mempelajari laporan keberlanjutan karena mengacu pada hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Menurut Marsuking (2020) dalam (Yuliandhari, Asalam, and Sinatrya 2022) teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) adalah teori yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertindak untuk kepentingan sendiri, tetapi juga menguntungkan seluruh pemangku kepentingan. Teori pemangku kepentingan juga menyatakan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan dan memerhatikan kebutuhan pemangku kepentingannya (Indriyani dan Yuliandhari, 2020). Menurut Freeman (1984) *stakeholder* adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kegiatan operasional

perusahaan dan berperan penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Pemangku kepentingan meliputi pemegang saham, pelanggan, media, karyawan, pemerintah, pemasok, komunitas lokal, pencinta lingkungan, dan pesaing (Ariana 2016).

Perusahaan tidak dapat merumuskan tujuan perusahaannya dengan baik jika perusahaan tidak memahami dan mengabaikan keinginan para pemangku kepentingan. Dari sini dapat diartikan bahwa perusahaan membutuhkan dukungan dari stakeholders yang berperan penting dalam kelangsungan hidup perusahaan. Teori pemangku kepentingan juga mengasumsikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki hak untuk menerima informasi tentang operasi perusahaan (Ruhana dan Hidayah, 2019) dalam (Yuliandhari, Asalam, and Sinatrya 2022).

### 3. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Menurut teori legitimasi, perusahaan tetap percaya bahwa mereka bertindak sesuai dengan batasan dan norma masyarakat di sekitar untuk memastikan bahwa tindakan mereka dianggap sah oleh masyarakat (Deegan dan Unerman, 2011) dalam (Rudyanto and Nps 2014). Mirip dengan hubungan prinsipal-agen dalam teori keagenan, perusahaan bertindak sebagai agen dan pemangku kepentingan bertindak sebagai prinsipal dengan kontrak sosial yang terus memantau tindakan perusahaan untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan cara yang dapat diterima. Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial mereka sesuai dengan tekanan dari pemangku kepentingan untuk mencapai legitimasi sosial dan menerima respon positif dari pemangku kepentingan (Aguilera, Rupp, Williams, dan Janapathi, 2007; Margolis dan

Walsh, 2003 dalam Sweeney dan Coughlan, 2008; Wang dan Qian, 2011) dalam (Rudyanto and Nps 2014).

Teori legitimasi didasarkan pada gagasan bahwa organisasi bisnis adalah institusi yang dibangun secara sosial dan masyarakat memiliki ekspektasi langsung maupun tidak langsung tertentu terhadap perusahaan (DiMaggio dan Powell, 1991; Meyer dan Rowan, 1977) dalam (Orazalin and Mahmood 2020). Teori legitimasi mempengaruhi kebijakan pengungkapan perusahaan, yang diperlukan untuk memberikan informasi yang berguna kepada pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan (Bradley, 2004) dalam (Orazalin and Mahmood 2020). Seperti yang dinyatakan oleh Haniffa dan Cooke (2005) dalam (Orazalin and Mahmood 2020), SR dapat digunakan sebagai alat untuk melegitimasi tindakan perusahaan bagi pemangku kepentingan, dan oleh karena itu, perusahaan memiliki lebih banyak insentif untuk mengungkapkan informasi keberlanjutan yang lebih tinggi.

#### 4. *Leverage*

*Leverage* adalah penggunaan aset dan sumber pembiayaan perusahaan yang mempunyai biaya tetap (*Fixed cost*), yaitu berasal dari sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman karena memiliki bunga sebagai beban tetap dengan tujuan meningkatkan kemungkinan keuntungan pemegang saham, dapat diartikan bahwa *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek ataupun jangka panjang jika perusahaan tersebut dilikuidasi (Sjahrian dalam Satriana, 2017:23 dan Kasmir, 2017:151) dalam (Pulungan et al. 2022). Penggunaan jumlah hutang perusahaan tergantung pada keberhasilan perusahaan dalam

menghasilkan pendapatan dan tersedianya dana untuk dijadikan jaminan atau hutang.

Menurut Sutrisno (2013) dalam (sustainability report 2000) Rasio *leverage* dapat diukur dengan berbagai cara, yaitu:

- a. Rasio Utang Terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*), Rasio ini mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari utang. Utang ini termasuk dalam total utang lancar dan tidak lancar perusahaan. Rasio utang yang rendah dapat menyebabkan tingkat keamanan dana perusahaan yang lebih baik dan disukai oleh kreditur, rasio ini dapat diukur sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- b. Rasio Utang dengan Modal (*Debt to Equity Ratio*) Rasio ini mengukur utang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah modal sendiri dibanding dengan utangnya dan sebaliknya, utang perusahaan tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Rasio ini dapat diukur sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

- c. Rasio Laba sebelum Bunga dan Pajak (*Long Term Debt to Equity Ratio*) Merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri dengan tujuan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan, rasio ini dapat diukur sebagai berikut:

$$\text{Long Term DER} = \frac{\text{Total Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan debt to *equity ratio* (DER) yaitu rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan membandingkan semua utang, termasuk utang lancar dengan total ekuitas. Rasio ini berguna untuk menentukan tingkat dana yang disediakan oleh kreditur. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan sebagai jaminan utang (Afifah, Fujianti, and Mandagie 2022).

##### **5. Tekanan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)**

Menurut Lamont, 2004 dalam (Rudyanto and Nps 2014), pemangku kepentingan adalah orang, kelompok, atau organisasi yang memiliki ketertarikan atau kepentingan dalam organisasi tertentu. Perusahaan tidak dapat beroperasi tanpa dukungan pemangku kepentingan, dan setiap klasifikasi industri memiliki pemangku kepentingan utama (*primary stakeholder*) yang berbeda (Fernandez-Feijoo, Romero, dan Ruiz, 2014; Branco dan Rodriguez, 2008) dalam (Rudyanto and Nps 2014).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* adalah semua pihak dalam masyarakat, baik individu, komunitas maupun kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan dengan organisasi/perusahaan dan pertanyaan/masalah yang diangkat. Syarifuddin dan Suryanto (2016) dalam (sustainability report 2000) membagi pemangku kepentingan sebagai berikut:

###### **a. Pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal**

Pemangku kepentingan (*Stakeholder*) internal adalah *stakeholder* yang berada di lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer, dan pemegang saham (*shareholder*). Pemangku kepentingan (*stakeholder*)

eksternal adalah pemangku kepentingan yang berada di luar lingkungan organisasi, seperti penyalur atau pemasok, konsumen, masyarakat, pemerintah, dan lain-lain.

b. *Stakeholder* primer, sekunder, dan marjinal

Tidak semua faktor yang relevan perlu dipertimbangkan. Bisnis perlu menetapkan prioritas. Pemangku kepentingan yang paling penting disebut pemangku kepentingan primer, pemangku kepentingan yang kurang penting disebut sebagai pemangku kepentingan sekunder dan mereka yang biasanya diabaikan disebut sebagai pemangku kepentingan marjinal.

c. Pemangku kepentingan tradisional dan masa depan

Karyawan dan konsumen dapat digambarkan sebagai pemangku kepentingan tradisional karena mereka saat ini terkait dengan organisasi. Pemangku kepentingan masa depan adalah pemangku kepentingan pada masa yang diharapkan dapat memengaruhi organisasi seperti mahasiswa, peneliti, dan konsumen potensial.

d. *Proponents, opponents, dan uncommitted*

Pemangku kepentingan meliputi kelompok yang pro organisasi (pembela), anti organisasi (lawan), dan ada yang tidak peduli atau mengabaikan (*uncommitted*).

e. *Silent majority* dan *vocal minority*

Dilihat dari bagaimana *stakeholder* dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan penolakan atau dukungannya dengan lantang (aktif) namun ada juga yang mengungkapkannya secara diam-diam (pasif).

Selain itu, Donaldson dan Preston (1995) dalam (sustainability report 2000) menjelaskan dalam model *stakeholder* bahwa pihak-pihak yang harus diperhatikan oleh perusahaan tidak hanya individu atau kelompok yang dipengaruhi atau memengaruhi perusahaan dalam hal transaksi ekonomi, tetapi juga Individu atau kelompok yang secara tidak langsung mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, kebijakan dan operasi Perusahaan. Pemangku kepentingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1) **Lingkungan**

Lingkungan bisnis adalah semua unsur di dalam dan di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi satu atau keseluruhan perusahaan. Ada dua jenis klasifikasi lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah faktor-faktor yang berlaku atau kondisi umum dalam organisasi. Lingkungan eksternal adalah segala sesuatu di luar batas organisasi yang dapat mempengaruhi perusahaan (Ii and Teori 1995). Sektor yang melibatkan pemangku kepentingan lingkungan meliputi pertanian, pertambangan, kimia, permesinan, mobil dan komponennya, kabel, real estate, perumahan dan konstruksi, energi, jalan tol, bandara, pelabuhan, transportasi, non konstruksi, elektronik (Ii and Teori 1995).

### 2) **Pemegang Saham**

Pemegang saham (*shareholder/stockholder*) adalah individu yang memiliki sebagian saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, mereka secara otomatis menjadi pemilik bersama



perusahaan. Selain perorangan, korporasi dan perusahaan juga dapat memiliki saham di perusahaan lain. Jumlah pemegang saham tergantung pada jenis perusahaan. Jenis yang dimaksud adalah perusahaan terbatas tertutup (PT) dan perusahaan terbuka (PT Tbk). Perusahaan publik didirikan setelah IPO atau tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Investasi 2022). PT memiliki sekurang-kurangnya dua pemegang saham, baik perorangan maupun badan hukum. Perusahaan swasta dapat memiliki satu pemegang saham. Namun, pemegang saham perorangan ini memiliki waktu maksimal enam bulan untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain atau mencari pemegang saham baru. Kalau tidak, dia mungkin kehilangan bisnisnya. PT Tbk sangat berbeda dengan perusahaan tertutup. Karena sifatnya yang terbuka dan listing yang mahal, perusahaan publik harus memiliki setidaknya 300 pemegang saham untuk tetap berada di BEI (Investasi 2022). Berdasarkan (Cermati.com 2021) pemegang saham sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1) Pemegang Saham adalah orang perseorangan, perusahaan atau badan hukum yang memiliki paling sedikit satu saham di perusahaan tersebut. (2) Pemegang saham mayoritas adalah mereka yang memiliki dan menguasai lebih dari 50% saham beredar perseroan. (3) Pemegang saham minoritas yaitu mereka yang memiliki kurang dari 50 persen saham perusahaan.

### **3) Kreditur**

Secara bahasa, kreditur adalah orang atau badan usaha yang memberikan pinjaman (hutang). Sementara itu, UU No. 37 tahun

2004 tentang kepailitan mendefinisikan kreditur sebagai orang yang memiliki hak kredit baik berdasarkan kontrak maupun hukum dan dapat memperoleh kembali hak tersebut di pengadilan (NISP 2021). Dalam hal regulasi pelindung, kreditur memiliki hak khusus untuk melakukan berbagai tindakan saat kreditnya macet seperti menyita aset atau menggugat aset tersebut. Namun, lembaga perkreditan juga mendapat pengawasan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar tidak bertindak semena-mena untuk menegakkan haknya (NISP 2021). Berdasarkan (Ramadhan 2022), setiap kreditur pasti memiliki mekanisme dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), beberapa jenis mekanisme tersebut :

- a) Kreditur separatis, merupakan kredit yang memiliki hak jaminan melalui mekanisme substantif seperti pinjaman pegadaian, hak tanggungan, obligasi perwalian, resi gudang, maupun hipotik. Namun, dalam hal terjadi kepailitan berdasarkan Pasal 55 UU K-PKPU, kreditur yang diberhentikan dapat menggunakan hak tanggungannya sesuai dengan ketentuan UU K-PKPU.
- b) Kreditur konkuren, adalah kreditur tanpa jaminan. Contoh dasar kreditur konkuren adalah adanya kontrak hutang tanpa hak jaminan atau agunan. Kreditor biasanya mitra bisnis yang barang atau jasanya belum dibayar.
- c) Kreditur preferen, merupakan jenis kreditur yang memiliki hak khusus. Dengan kata lain, kreditur utama. Dimana dalam

pelunasan hak piutang, kreditur ini lebih diprioritaskan dibanding dengan kreditur jenis lainnya. Keistimewaan ini diatur dalam Pasal 1134 dan 1149 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Contoh pajak yang dikenakan oleh pemerintah, dan pembayaran upah kepada pekerja/buruh yang terutang, pembayaran upah kepada pekerja/buruh yang terutang diprioritaskan atas semua jenis kreditur termasuk kreditur separatis, hak tagihan negara, kantor lelang, dan badan publik yang didirikan pemerintah.

Berdasarkan beberapa istilah kreditur di atas terdapat Perbedaan tahapan dan proses pembayaran yang berlaku untuk kondisi kreditur yang berbeda. Sehingga ketika terjadi kepailitan atau PKPU, para kreditur memahami kedudukan hukumnya dan proses penyelesaiannya.

#### **6. Laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*)**

Laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan yang mencerminkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang ada pada perusahaan yang mempengaruhi kelangsungan aktivitas perusahaan (Lozano, 2015) dalam (Ii and Teori 1995). GRI (2013) dalam (Alfaiz and Aryati 2019) mendefinisikan laporan pembangunan berkelanjutan sebagai praktik pengukuran untuk mengungkapkan aktivitas perusahaan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi sebagai tanggung jawab kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam implementasi keberlanjutan. *Global Reporting Initiative (GRI)* adalah standar untuk pelaporan keberlanjutan perusahaan. Selain aspek

keuangan, *sustainability report* juga memberikan informasi mengenai dampak perusahaan terhadap aspek lingkungan dan sosial (Alfaiz and Aryati 2019). Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keberlanjutan adalah laporan yang memuat selain informasi keuangan, juga informasi non-keuangan yang dapat digunakan perusahaan sebagai acuan untuk mengidentifikasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan perusahaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dari Pasal 66 UU No. 40 Tahun 2007, Pemerintah Indonesia memberlakukan kewajiban kepada perusahaan yang beroperasi di Indonesia untuk mengungkapkan informasi tentang pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik dalam pasal 10 (1) menyatakan bahwa Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik menyiapkan laporan pembangunan berkelanjutan. Pasal 10 (2) menyatakan bahwa laporan pembangunan berkelanjutan dapat disusun secara atau tidak terpisah dari laporan keuangan tahunan. Pasal 10 ayat (6) menyebutkan bahwa OJK mewajibkan perusahaan menyampaikan laporan pembangunan berkelanjutan mulai 1 Januari 2019 (Adriani and Mahayana 2021). Adapun manfaat dan prinsip dari laporan keberlanjutan menurut (Ii and Teori 1995), yaitu:

**a) Manfaat Laporan Keberlanjutan**

Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD) menjelaskan manfaat penerbitan laporan keberlanjutan, antara lain:

- 1) Laporan keberlanjutan menginformasikan pemangku kepentingan dan meningkatkan prospek perusahaan serta membantu mewujudkan transparansi.
- 2) Laporan keberlanjutan dapat membantu membangun reputasi sebagai alat yang meningkatkan nilai merek, pangsa pasar, dan loyalitas konsumen jangka panjang.
- 3) Laporan keberlanjutan dapat menjadi cerminan bagaimana suatu perusahaan mengelola risikonya.
- 4) Laporan keberlanjutan dapat digunakan sebagai pendorong pemikiran dan tindakan manajerial yang didukung dengan semangat bersaing.
- 5) Laporan keberlanjutan dapat mengembangkan dan memfasilitasi implementasi sistem manajemen yang lebih baik untuk mengelola dampak lingkungan, ekonomi dan sosial.
- 6) Laporan pertanggungjawaban biasanya secara langsung mencerminkan kemampuan dan kemauan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham dalam jangka panjang.
- 7) Laporan keberlanjutan membantu membangkitkan minat pemegang saham melalui visi jangka panjang dan menunjukkan bagaimana nilai perusahaan dapat ditingkatkan dalam kaitannya dengan masalah sosial dan lingkungan.

**b) Prinsip-prinsip Laporan Keberlanjutan**

*Global Reporting Initiative* (GRI) menetapkan prinsip-prinsip pelaporan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan prinsip-prinsip

tersebut, informasi yang terkandung dalam laporan pembangunan berkelanjutan dihasilkan dengan kualitas yang lebih tinggi dan layak untuk dievaluasi oleh para pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- 1) Keseimbangan, laporan keberlanjutan harus menyajikan aspek positif dan negatif dari aktivitas perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, laporan keberlanjutan harus memberikan gambaran yang tidak bias terhadap kinerja perusahaan.
- 2) Laporan keberlanjutan yang dapat dibandingkan yang mencakup masalah dan data yang ada harus dipilih, dikumpulkan, dan disajikan secara konsisten. Informasi tersebut harus disajikan agar para pemangku kepentingan dapat menganalisis perubahan operasional perusahaan secara berkala.
- 3) Kecermatan, laporan berkelanjutan memuat informasi yang cukup cermat dan rinci sehingga pemangku kepentingan dapat menilai kinerja perusahaan.
- 4) Ketepatan waktu, laporan pembangunan berkelanjutan disusun secara teratur dan tersedia tepat waktu pada saat pemangku kepentingan membutuhkannya untuk pengambilan keputusan.
- 5) Kejelasan, laporan pembangunan berkelanjutan harus disajikan sedemikian rupa sehingga para pemangku kepentingan yang menggunakan laporan tersebut dapat memahami dan membacanya.

- 6) Keandalan, data dan proses yang digunakan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban harus dikumpulkan, dicatat, disusun, dianalisis dan diungkapkan secara teruji yang dapat membentuk kualitas dan relevansi laporan.

## **7. Umur Perusahaan**

Menurut (Pulungan et al. 2022) umur perusahaan dapat diartikan sebagai waktu pendirian atau beroperasinya perusahaan, lama atau pendeknya umur perusahaan, yang dapat menentukan keberhasilan perusahaan tersebut dalam kegiatan operasionalnya. Tentunya hanya perusahaan yang mengelola bisnisnya dengan baik dan mampu mengungguli pesaing lainnya yang mampu bertahan lama. Perusahaan yang sudah lama berdiri pasti lebih banyak pengalaman dan keberadaannya sudah cukup eksis di lingkup masyarakat. Perusahaan yang lebih tua dapat meningkatkan praktik pelaporan keberlanjutan dari waktu ke waktu (Bhatia dan Tuli,2017) dalam (Pulungan et al. 2022).

Perusahaan dengan sejarah panjang cenderung memiliki kepemimpinan yang baik dalam menerbitkan laporan tanggung jawab perusahaan. Manajemen perusahaan akan meningkatkan kualitas informasi akuntansi untuk menghasilkan informasi yang lengkap dengan biaya rendah dibandingkan dengan perusahaan yang lebih muda (Bhatia dan Tuli 2017) dalam (Pulungan et al. 2022). Perusahaan yang lebih muda memiliki sumber daya yang terbatas, kurangnya pengalaman karyawan dan jaringan eksternal, yang mengarah pada fakta bahwa perusahaan lemah dalam mengambil risiko dan dengan demikian perusahaan mencapai tingkat kegagalan yang lebih tinggi. Sedangkan, perusahaan yang lebih tua memiliki sumber daya yang baik dan terpenuhi, yang

membuat perusahaan tersebut mengambil lebih banyak risiko sehingga mengurangi jumlah kegagalan (Pulungan et al. 2022).

## B. Perumusan Model Penelitian

### 1. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan faktor penting dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, penulis dapat memperkaya teori dengan melihat kajian-kajian sebelumnya. Penulis juga tidak dapat menemukan judul yang sama dengan penulis. Namun penulis membawa beberapa kajian yang menjadi bahan referensi untuk memperkaya materi pendidikan yang dibuat dalam karya ini. Di bawah ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis:

**Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Jurnal/skripsi	Judul	Hasil
1.	(Fuadah and Safitri 2018)	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi	Pengaruh Ukuran Dewan , Ukuran Perusahaan , Leverage dan Profitabilitas terhadap Laporan Berkelanjutan di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh negatif pada variabel karakteristik perusahaan terhadap kinerja keuangan, serta pada variabel kualitas <i>sustainability report</i> baik dari segi tekanan <i>stakeholder</i> maupun segi kinerja keuangan. Sedangkan hasil pengaruh positif ada pada variabel tekanan <i>stakeholder</i> terhadap kinerja keuangan, serta antar variabel karakteristik perusahaan dan kualitas <i>sustainability report</i> . Sementara itu, perhitungan intervening baik pada karakteristik perusahaan maupun tekanan <i>stakeholder</i> yang dimediasi oleh kinerja keuangan keduanya

*Bersambung ke halaman berikutnya*



Tabel 2.1 (Lanjutan)

No	Peneliti	Jurnal/skripsi	Judul	Hasil
2.	(Alfaiz and Aryati 2019)	Jurnal akuntansi dan keuangan methodist	Pengaruh tekanan stakeholder dan kinerja keuangan terhadap kualitas <i>sustainability report</i> dengan komite audit sebagai variabel moderasi	menunjukkan adanya pengaruh positif. Perusahaan yang mendapatkan tekanan dari karyawan dan konsumen memiliki kualitas <i>sustainability report</i> yang lebih tinggi dari perusahaan lain. Tekanan pemegang saham yang dimoderasi oleh komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas <i>sustainability report</i> .
3.	(Hermawan and Sutarti 2021)	Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	1. Likuiditas, <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> , dan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> . 2. Likuiditas, <i>leverage</i> , dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .
4.	(Yuliandhari, Asalam, and Sinatrya 2022)	Riset dan jurnal akuntansi	Pengaruh Tekanan Pemegang Saham dan Umur Perusahaan terhadap Kualitas <i>Sustainability Report</i>	Umur perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan, tekanan pemegang saham tidak mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan
5.	(Pulungan et al. 2022)		Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Pelibatan <i>Stakeholder</i> dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan	Profitabilitas, <i>leverage</i> dan pelibatan <i>stakeholder</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan
6.	(Septavianty and Fitria 2022)	Jurnal ilmu dan riset akuntansi	Pengaruh karakteristik perusahaan, tekanan <i>stakeholder</i> terhadap kualitas	1. Karakteristik perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan 2. Tekanan <i>stakeholder</i> berpengaruh positif terhadap kinerja

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 (Lanjutan)

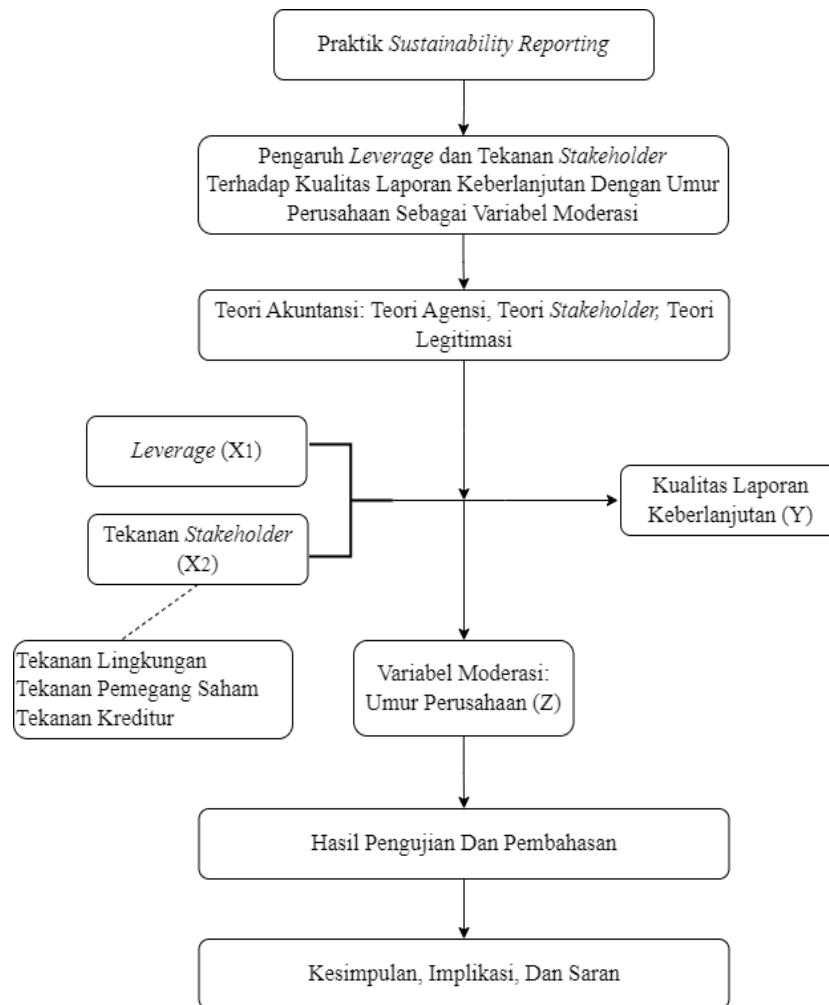
No	Peneliti	Jurnal/skripsi	Judul	Hasil
			<i>sustainability report</i> melalui kinerja keuangan	keuangan
				3. Karakteristik perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas <i>sustainability report</i>
				4. Tekanan <i>stakeholder</i> , kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap kualitas <i>sustainability report</i>
				5. Kinerja keuangan memediasi pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kualitas <i>sustainability report</i>
				6. Kinerja keuangan memediasi pengaruh tekanan <i>stakeholder</i> terhadap kualitas <i>sustainability report</i>

Sumber: Jurnal ilmiah akuntansi 2018-2022

## 2. Kerangka Pemikiran

Baik penulis maupun praktisi menganggap laporan pembangunan berkelanjutan sebagai topik yang menarik. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan telah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk secara aktif memantau operasi bisnis yang ada dan dampaknya secara berkelanjutan terhadap lingkungan sekitar. Contohnya tragedi lingkungan dan sosial yang terjadi di Kalimantan Tengah pada tahun 2018. PT Binasawit Abadi Pratama dan PT Smart Tbk melakukan pencemaran limbah pengolahan sawit di Danau Sembuluh, Kalteng yang menyebabkan mata pencaharian masyarakat enam desa atas perikanan di danau tersebut praktis berhenti (Alfaiz and Aryati 2019). Dan masih banyak kasus lain yang subjeknya adalah *sustainability report*. Faktor-faktor yang akan diteliti pengaruhnya diantaranya, *Leverage*, tekanan dari *stakeholder* (lingkungan, pemegang saham, kreditur) dan umur perusahaan.

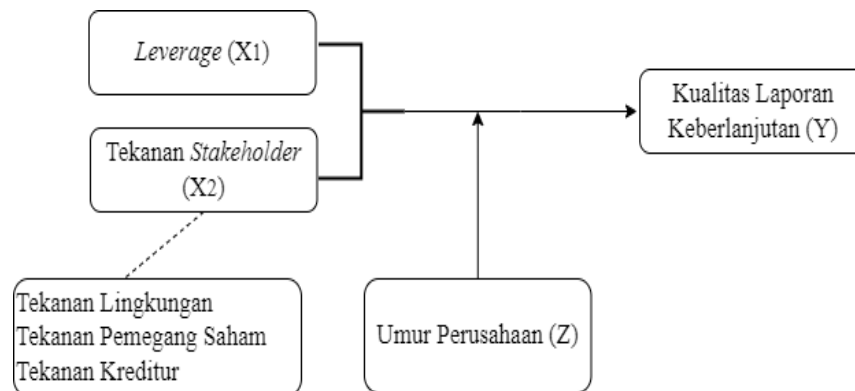
*Leverage* merupakan faktor pertama yang akan diteliti, dimana leverage didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset tetap untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan. Lingkungan didefinisikan sebagai elemen internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi satu atau seluruh perusahaan. Pemegang saham adalah orang yang memiliki bagian dari saham yang diterbitkan perusahaan. Kreditur didefinisikan sebagai pihak yang memiliki piutang yang timbul karena suatu perjanjian. Menurut Alfaiz dan Aryati (2019) dalam (Septavianty and Fitria 2022) teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan akan terus memastikan mereka beroperasi dalam batas dan norma masyarakat di sekitar mereka untuk memastikan bahwa apa yang mereka lakukan dianggap legal oleh masyarakat. teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan tetap memastikan bahwa mereka beroperasi dalam batas dan norma masyarakat sekitar, untuk memastikan bahwa masyarakat menganggap aktivitas mereka sah. Selain itu, teori stakeholder menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh stakeholder itu sendiri dan setiap perusahaan memiliki stakeholder yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawabannya. Usia perusahaan juga merupakan faktor moderasi yang diselidiki. Umur perusahaan dapat diartikan sebagai waktu pendirian atau beroperasinya perusahaan, lama atau pendeknya umur perusahaan yang dapat menentukan keberhasilan perusahaan tersebut dalam kegiatan operasionalnya. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menggambarkan sketsa kerangka pemikiran yang terdapat pada gambar 2.1 dibawah ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

### 3. Model Penelitian

Model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2. 2 Model Penelitian

#### 4. Perumusan Hipotesis

##### a. Pengaruh *Leverage* terhadap kualitas laporan keberlanjutan

Rasio leverage adalah rasio yang menggambarkan bagaimana suatu perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya, tingkat rasio *leverage* yang tinggi mencerminkan ketergantungan perusahaan yang tinggi terhadap utang. Tingkat rasio leverage yang tinggi juga dapat mempengaruhi proses pengungkapan dan pembuatan informasi sosial dimana proses pengungkapan dan pembuatan informasi sosial membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk dapat disajikan secara konsisten setiap tahunnya sehingga akan berakibat pada turunnya pendapatan. Pendapatan yang lebih rendah akan mengakibatkan keuntungan menurun juga sehingga perusahaan akan berusaha mengurangi atau menghentikan kegiatan terkait lingkungan dan sosial, karena pengungkapan dan pelaksanaannya membutuhkan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan memilih untuk mengurangi pelaporan yang bersifat sukarela dan cenderung fokus pada kegiatan ekonomi saja (Meutia and K 2019). Sedangkan perusahaan dengan rasio *leverage* rendah akan menerbitkan laporan tanggung jawab perusahaan yang lebih komprehensif. Berdasarkan hasil penelitian dari (Fuadah and Safitri 2018) variabel *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *sustainability report* karena semakin rendah *leverage*, maka semakin tinggi *sustainability report* dilaporkan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**H1: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keberlanjutan**

b. Pengaruh tekanan lingkungan terhadap kualitas laporan keberlanjutan

Menurut teori legitimasi, perusahaan yang peka terhadap lingkungan berusaha untuk menerbitkan laporan tanggung jawab sosial dengan kualitas yang lebih baik untuk melegitimasi operasi perusahaan. Komunitas dan kelompok perlindungan lingkungan menuntut agar perusahaan memperbaiki lingkungan yang rusak akibat operasi mereka. Untuk memenuhi tuntutan ini, perusahaan berusaha untuk memikul tanggung jawab sosial dan menyajikannya secara lebih transparan. Karena semakin sensitif industri terhadap lingkungan, semakin sensitif pemegang saham terhadap informasi lingkungan, maka semakin penting pula laporan lingkungan perusahaan (laporan tanggung jawab sosial) (Abdullah, dan Fatima, 2014; Astrid, 2017) dalam (Alfaiz and Aryati 2019). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

**H2: Tekanan lingkungan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan**

c. Pengaruh tekanan pemegang saham terhadap kualitas laporan keberlanjutan

Perusahaan dengan tingkat penyebaran kepemilikan saham yang rendah cenderung memiliki laporan tanggung jawab sosial yang lebih buruk daripada perusahaan dengan tingkat penyebaran kepemilikan saham yang tinggi. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan tingkat penyebaran kepemilikan saham yang rendah memberikan tekanan yang lebih ringan terhadap perusahaan untuk melaporkan tanggung jawab sosialnya karena terkonsentrasinya jumlah pemegang saham dan pemegang saham yang

sedikit tersebut mendapat informasi yang lebih menyeluruh (Arum, 2017; Astrid, 2017) dalam (Alfaiz and Aryati 2019). Sjafjell (2016) dalam (Alfaiz and Aryati 2019) menambahkan bahwa persyaratan di beberapa negara melarang pemegang saham mayoritas untuk bertindak dengan cara yang dapat merugikan kepentingan seluruh perusahaan, terutama keberlanjutan perusahaan. Selain itu, pemegang saham dapat memberikan tekanan yang lebih besar dengan terus memantau keberlangsungan perusahaan dengan tingkat konsentrasi kepemilikan yang tinggi. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

**H3: Tekanan pemegang saham berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan**

d. Pengaruh tekanan kreditur terhadap kualitas laporan keberlanjutan

Kreditur sebagai pihak penyedia pinjaman merupakan pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan dan tingkat pengungkapan informasi (Lu & Abeysekera, 2014), Konsep teori pemangku kepentingan menjelaskan bahwa kreditur memiliki kekuatan dan dapat memberikan tuntutan yang sah melalui pinjamannya. Perkembangan lebih lanjut kebijakan kredit juga semakin mengarah pada sistem kredit hijau, dimana pemberi pinjaman (kreditur) menjadikan informasi lingkungan perusahaan sebagai pertimbangan kredit. Oleh karena itu, untuk memastikan kesehatan perusahaan, kreditur menuntut perusahaan untuk transparan dan mengungkapkan lebih banyak informasi, termasuk *sustainability report* yang berkualitas (Huang & Kung, 2010; Lu

& Abeysekera, 2014) dalam (Sriningsih and Wahyuningrum 2022).

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

**H4: Tekanan kreditur berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan**

- e. Umur perusahaan memoderasi hubungan *leverage* dengan kualitas laporan keberlanjutan

Usia perusahaan mengacu pada tanggal perusahaan didirikan atau dioperasikan. Panjang atau pendeknya umur perusahaan dapat menentukan keberhasilan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Hasil penelitian dari (Pulungan et al. 2022) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Secara teoritis, usia perusahaan mempengaruhi publikasi laporan keberlanjutan karena semakin tua perusahaan, maka praktik pelaporan berkelanjutan perusahaan semakin meningkat karena didukung oleh manajemen yang berpengalaman. Semakin lama perusahaan berdiri, semakin banyak kebutuhannya. Jika perusahaan cenderung menggunakan dana eksternal, terutama hutang dalam pembiayaannya dibandingkan dengan dana internal, hal ini menyebabkan *leverage* perusahaan menjadi tinggi. Jika manajemen tidak dapat mengimbangi, perusahaan cenderung gagal memenuhi perjanjian pinjaman. Diharapkan akuntan perusahaan yang sudah lama berdiri dapat menyeimbangkan dan mengatur stabilitas utang agar menurunnya kemungkinan pelanggaran perjanjian kredit, sehingga perusahaan tidak perlu mengurangi biaya untuk pengungkapan informasi sosial, lingkungan



dan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

**H5: Umur perusahaan dapat memoderasi hubungan antara *leverage* dengan kualitas laporan keberlanjutan**

- f. Umur perusahaan memoderasi hubungan tekanan lingkungan dengan kualitas laporan keberlanjutan

Perusahaan yang memiliki umur yang lebih panjang akan memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam menerbitkan laporan tahunannya dan tentu juga akan lebih memahami kebutuhan dari pihak eksternal akan informasi tentang perusahaannya (Sudaryono, 2007) dalam (Ciriyani and Putra 2016). Berdasarkan teori legitimasi, legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang sangat dibutuhkan dan diinginkan oleh perusahaan dari masyarakat itu sendiri. Perusahaan yang memiliki umur yang lebih panjang merupakan perusahaan yang dapat bertahan cukup lama dalam kehidupan bisnis mereka. Keberlangsungan hidup perusahaan ini terus berlanjut karena adanya sebuah pengakuan dari masyarakat yaitu legitimasi. Gamerschlag, et al (2011) dalam (Alfaiz and Aryati 2019) berpendapat bahwa perusahaan yang berada di bawah tekanan kelompok lingkungan mengungkapkan semua isu secara lebih. Kenaikan tingkat transparansi laporan keberlanjutan mungkin merupakan hasil dari keinginan perusahaan untuk mengurangi persepsi masyarakat akan dampak lingkungan yang lebih besar yang dimiliki industri (Fernandez-Feijoo et al., 2012) dalam (Alfaiz and Aryati 2019).

**H6: Umur perusahaan dapat memoderasi hubungan antara tekanan lingkungan dengan kualitas laporan keberlanjutan**

- g. Umur perusahaan memoderasi hubungan tekanan pemegang saham dengan kualitas laporan keberlanjutan

Usia perusahaan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan perusahaan (Correa-Garcia et al., 2020) dalam (Yuliandhari, Asalam, and Sinatrya 2022). Dengan meningkatkan kualitas laporan tanggung jawab perusahaan (*sustainability report*), perusahaan bertujuan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan dan juga meningkatkan kualitas perusahaan (Suwasono dan Anggraini, 2021) dalam (Yuliandhari, Asalam, and Sinatrya 2022). Perusahaan yang sudah lama tercatat di BEI juga dianggap lebih berpengalaman, sehingga mereka merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan keberlanjutan yang lebih berkualitas. Selain itu, perusahaan yang lebih muda menganggap publikasi laporan pertanggungjawaban sebagai publikasi yang penting dan karenanya berusaha membuat publikasi laporan keberlanjutan sebaik mungkin tidak kalah dari perusahaan yang jauh lebih tua. Penelitian Arum (2017) dalam (Alfaiz and Aryati 2019) menyatakan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara industri yang berpusat pada investor (pemegang saham) dan transparansi laporan keberlanjutan. Artinya, perusahaan dari industri yang berorientasi pada investor (pemegang saham) membuat laporan keberlanjutan yang lebih transparan. Oleh karena itu, hipotesis dapat disajikan sebagai berikut:

**H7: Umur perusahaan dapat memoderasi hubungan antara tekanan pemegang saham dengan kualitas laporan keberlanjutan**

- h. Umur perusahaan memoderasi hubungan tekanan kreditur dengan kualitas laporan keberlanjutan

Semakin lama perusahaan berdiri, semakin banyak kewajiban yang dapat diungkapkan dibanding perusahaan yang baru. Di Indonesia, perusahaan sangat bergantung pada utang yang tercermin dari rasio utang terhadap total aset yang mendekati angka satu. Dapat diartikan bahwa di Indonesia perusahaan memiliki aset yang sebagian besar dibiayai oleh hutang (Hermawan and Sutarti 2021). Ketika perusahaan lebih bersedia untuk mengambil dana dari kreditur, maka utang perusahaan akan meningkat sehingga perusahaan juga harus mengeluarkan biaya yang tinggi dalam pengelolaan informasi pelaporan. Dalam mengembangkan kebijakan pinjaman yang mengarah ke sistem kredit hijau, pemberi pinjaman (kreditur) mempertimbangkan informasi lingkungan perusahaan pada saat memberikan pinjaman kepada perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan sehat. Kebijakan perusahaan yang terkait dengan informasi lingkungan akan menjadi pertimbangan bagi kreditur dan digunakan sebagai dasar penilaian atas keberlanjutan perusahaan.

Tingkat hutang yang tinggi memberikan sinyal bahwa perusahaan mampu melakukan pembayaran kewajiban tepat waktu dan ini dapat memberikan sinyal positif bagi kreditur. Sinyal ini mendorong kreditur selalu mendukung kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena

itu, kreditur akan menuntut perusahaan untuk lebih transparan dan mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan keberlanjutannya. Selain itu, kreditur juga akan menekankan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang disesuaikan dengan standar GRI, ketika informasi tersebut semakin mendekati tujuan utama laporan keberlanjutan maka akan semakin berkualitas laporan yang diterbitkan perusahaan (Sriningsih and Wahyuningrum 2022). Penelitian (Sawitri and Ardhiani 2023) menyatakan bahwa tekanan kreditur mampu mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan perusahaan. Selain itu, penelitian (Yuliandhari, Asalam, and Sinatrya 2022) menyatakan bahwa umur suatu perusahaan sejak tercatat di BEI memengaruhi kualitas *sustainability report* yang disampaikan oleh perusahaan karena perusahaan yang telah lama tercatat di BEI juga dianggap lebih berpengalaman, sehingga merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menyampaikan *sustainability report* yang lebih bermutu.

**H8: Umur perusahaan dapat memoderasi hubungan antara tekanan kreditur dengan kualitas laporan keberlanjutan**